



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang	:	a.	bahwa <i>stunting</i> memiliki dampak buruk yang nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan terutama tinggi/panjang badan dan kecerdasan pada balita;
		b.	bahwa kejadian <i>stunting</i> pada balita masih terjadi di Kabupaten Banyumas sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
		c.	bahwa kejadian <i>stunting</i> disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas program dan sektoral;
		d.	bahwa pencegahan dan penanganan masalah gizi adalah amanah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023;
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
		3.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);

	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
	8.	Peraturan Daerah No. 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) ;
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
	11.	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
	12.	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
	13.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
	14.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-LB);
	15.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
	16.	Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/638 Tahun 2018 tentang “Tim Khusus Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> ”;
	17.	Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 440/6833 Tahun 2018 tentang “Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Untuk Cegah <i>Stunting</i> ”;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kabupaten / Kota adalah kabupaten Kota di Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyumas.
7. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2023 yang selanjutnya disingkat RAD *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2023 adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Penurunan Angka *Stunting* Tahun 2020– 2023.

**BAB II
RAD STUNTING**

Pasal 2

RAD *Stunting* merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk menurunkan angka *stunting* dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2020-2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum, Tantangan Dan Hambatan
 - c. BAB III : Arah Kebijakan Dan Strategi
 - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah *Stunting*
 - e. BAB V : Kerangka Pelaksanaan Dan Monitoring Evaluasi
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RAD *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD *Stunting* menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya percepatan pencapaian target penurunan *stunting* dan peningkatan status gizi di Kabupaten Banyumas.

**BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD *Stunting*.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 MAY 2020

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	Seleda	
2	Aspen Ker	
3	Kbg Hukm	
4	K-Pin kes	

LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020-2023

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020 – 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita (bayi dibawah lima tahun) sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Di Indonesia, sekitar 30.8% (hampir 8 juta) anak mengalami *stunting* (Riset Kesehatan Dasar/ Riskesdas 2018) dan Indonesia masuk dalam rangking ke 5 terbesar prevalensi *stunting* di seluruh dunia. Balita yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadi anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan terdapat resiko penurunan produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Kerangka intervensi *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu **Intervensi Gizi Spesifik** dan **Intervensi Gizi Sensitif**.

Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini bersifat jangka

pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita yaitu meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil dari Malaria. Intervensi ini juga dilakukan melalui beberapa kegiatan untuk mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terutama melalui pemberian ASI jolong/colostrum serta mendorong pemberian ASI Eksklusif 6 bulan dan mendorong kelanjutan pemberian ASI hingga anak/ bayi berusia 24 bulan. Setelah bayi berusia tepat 6 bulan asupan gizi harus ditambah dengan pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan yang secara tidak langsung memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah *stunting*. Intervensi ini bersifat jangka panjang dimana kegiatan ini melibatkan peran pemerintah, swasta, lintas sektoral, lintas program dan seluruh lapisan masyarakat.

Prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Banyumas mencapai 32% (Riskesdas 2018) sedangkan target Nasional adalah <20%. Untuk itu perlu adanya penanganan yang segera dan berkelanjutan dengan bekerjasama seluruh elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sehingga kami merasa perlu membuat kebijakan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah RAD Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Banyumas guna menurunkan prevalensi *stunting* secara signifikan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RAD *Stunting* Kabupaten Banyumas 2020-2023 adalah sebagai panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, lembaga/organisasi masyarakat dan swasta pada tataran Kabupaten yang dilandasi komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Banyumas melalui pencegahan dan penanggulangan *stunting* serta perbaikan pangan dan gizi melalui limar pilar yaitu : 1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; 2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; 3) Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa; 4) Ketahanan Pangan dan Gizi; 5) Pemantauan dan Evaluasi.

C. Dasar Hukum RAD *Stunting*

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269 / Menkes / Per /XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-LB);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
17. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/638 Tahun 2018 tentang “ Tim Khusus Pencegahan dan Penanganan *Stunting* ”;
18. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 440/6833 Tahun 2018 tentang “ Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Untuk Cegah *Stunting* ”.

b. Kependudukan

1. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Per Desember 2019 adalah 1.840.152 jiwa terdiri dari 928.093 laki-laki (50,44%) dan 912.059 perempuan (49,56%) tergabung dalam 603.844 rumah tangga / KK. Jumlah penduduk tahun 2019 yang tertinggi di Kecamatan Cilongok sebanyak 129.242 jiwa, sedangkan terendah di Kecamatan Purwojati sebanyak 38.948 jiwa.

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktifitas penduduk adalah angka beban tanggungan atau *dependency ratio*. Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk umur produktif (umur 15 – 64 tahun) secara kasar perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umur non produktif. Semakin tinggi rasio beban tanggungan, semakin tinggi pula jumlah penduduk non produktif yang ditanggung oleh penduduk umur produktif. Angka beban tanggungan atau *dependency ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 54.

Tabel 2.1 : Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km)
1	LUMBIR	102.66	53,060	516.85
2	WANGON	60.78	87,079	1,432.69
3	JATILAWANG	48.16	70,823	1,470.58
4	RAWALO	49.64	55,682	1,121.72
5	KEBASEN	54.00	69,653	1,289.87
6	KEMRANJEN	60.71	75,844	1,249.28
7	SUMPIUH	60.01	60,702	1,011.53
8	TAMBAK	52.03	52,777	1,014.36
9	SOMAGEDE	40.11	39,314	980.15
10	KALIBAGOR	35.73	57,724	1,615.56
11	BANYUMAS	38.09	55,504	1,457.18
12	PATIKRAJA	43.23	61,457	1,421.63
13	PURWOJATI	37.86	38,948	1,028.74
14	AJIBARANG	66.50	106,365	1,599.47
15	GUMELAR	93.95	55,694	592.80
16	PEKUNCEN	92.70	79,088	853.16
17	CILONGOK	105.34	129,242	1,226.90
18	KARANGLEWAS	32.50	67,919	2,089.82
19	SOKARAJA	29.92	90,637	3,029.31
20	KEMBARAN	25.92	82,537	3,184.30
21	SUMBANG	53.42	93,838	1,756.61
22	BATURRADEN	45.53	55,376	1,216.25
23	KEDUNGBANTENG	60.22	62,984	1,045.90
24	PURWOKERTO SELATAN	13.75	75,436	5,486.25
25	PURWOKERTO BARAT	7.40	54,591	7,377.16
26	PURWOKERTO TIMUR	8.42	58,995	7,006.53
27	PURWOKERTO UTARA	9.01	48,883	5,425.42
	Jumlah	1.327,59	1,840,152	1,386.08

Sumber : Didukcapil Kab. Banyumas Tahun 2019

Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebesar 1386/km², dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 7.377/ km², sedang kepadatan penduduk terendah pada Kecamatan Lumbir sebesar 517/km².

2. Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin yaitu perbandingan penduduk laki – laki dengan perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 adalah 928.093 jiwa (50,43%) jumlah penduduk laki-laki dan 912.059 jiwa (49,57%) jumlah penduduk perempuan. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Banyumas menurut kecamatan dan rasio jenis kelamin tahun 2019.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	Kecamatan	Penduduk			Rasio JK
		Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Lumbir	26.8360	26.224	53.060	102.3
2	Wangon	44.067	43.012	87.079	102.5
3	Jatilawang	35.730	35.093	70.823	101.8
4	Rawalo	28.206	27.476	55.682	102.7
5	Kebasen	35.325	34.328	69.653	102.9
6	Kemranjen	38.501	37.343	75.844	103.1
7	Sumpiuh	30.744	29.958	60.702	102.6
8	Tambak	26.487	26.29	52.777	100.7
9	Somagede	19.644	19.67	39.314	99.9
10	Kalibagor	29.115	28.609	57.724	101.8
11	Banyumas	27.813	27.691	55.504	100.4
12	Patikraja	30.774	30.683	61.457	100.3
13	Purwojati	19.682	19.266	38.948	102.2
14	Ajibarang	53.915	52.45	106.365	102.8
15	Gumelar	28.286	27.408	55.694	103.2
16	Pekuncen	40.154	38.934	79.088	103.1
17	Cilongok	65.514	63.728	129.242	102.8
18	Karanglewas	34.506	33.413	67.919	103.3
19	Kedungbanteng	45.356	45.281	90.637	100.2
20	Baturrenden	41.806	40.731	82.537	102.6
21	Sumbang	47.511	46.327	93.838	102.6
22	Kembaran	27.849	27.527	55.376	101.2
23	Sokaraja	31.874	31.11	62.984	102.5
24	Purwokerto Selatan	37.719	37.717	75.436	100.0
25	Purwokerto Barat	27.076	27.515	54.591	98.4
26	Purwokerto Timur	29.193	29.802	58.995	98.0
27	Purwokerto Utara	24.41	24.473	48.883	99.7
	Jumlah	928.093	912.059	1.840.152	101,8

Sumber : Didukcapil Kab. Banyumas Tahun 2019

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan badan piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.



Grafik 2.1 Chart Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Banyumas, 2019

Pada grafik 2.1 menunjukkan bahwa struktur penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda yang masih tinggi. Terlihat pada gambar menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 40-44 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia lanjut juga cukup besar, terutama laki-laki. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama laki-laki. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia lanjut. Bertambahnya jumlah

penduduk usia lanjut dapat dimaknai sebagai meningkatnya kesejahteraan, kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban, karena kelompok usia lanjut ini sudah tidak produktif lagi. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Prevalensi Beban Tanggungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Usia	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1	0-14 tahun	209.529	195.408	404,937
2	15-64 tahun	621,472	576,963	1,198,435
3	Lebih dari 65 tahun	136,799	99,981	236,780
	Jumlah	967.800	872.352	1.840.152
	Angka Beban Tanggungan	56	51	54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyumas, 2019

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio. Prevalensi Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk umur produktif (umur 15–64 tahun). Perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umur nonproduktif. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka beban tanggungan atau Dependency Ratio di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 54

Pada tabel 2.3, Angka Beban Tanggungan penduduk wilayah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2019 sebesar 54. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Tinggi rendahnya Prevalensi Beban Tanggungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu Prevalensi ketergantungan rendah bila kurang dari 30, Prevalensi ketergantungan sedang bila 30-40, dan Prevalensi ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Berdasarkan tabel 2.1 Prevalensi ketergantungan di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 termasuk dalam kategori tinggi (Soegimo, 2009).

Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data dan informasi mengenai penduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Ilmu pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat.

Pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi kesehatan serta kemampuan berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi, serta dapat ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dirinya dan keluarganya.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Tahun 2019 jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/belum memiliki Ijazah SD	203.329
2.	Tamat SD	599.369
3.	Tamat SLTP/Sederajat	284.234
4.	SLTA/Sederajat	268.014
5.	Diploma I/II	7.154
6.	Diploma III	20.277
7.	Diploma IV/Sarjana	51.201
8.	S2/S3 (master/doktor)	3.678

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyumas Tahun 2019

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten Banyumas Tahun 2019 paling banyak yaitu tamat SD sebesar 599.369 Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan peran tenaga kesehatan yang lebih optimal untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dirinya dan keluarganya.

B. Kondisi Umum Indikator

1. Kesehatan Ibu dan Anak

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kesehatan Ibu dan Anak

NO	INDIKATOR	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	STATUS	SUMBER
1.	Ibu hamil cakupan K4	100	100	●	Dinkes
2.	Cakupan Bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	100	100	●	Dinkes
3.	Cakupan layanan ibu nifas	100	100	●	Dinkes
4.	Keluarga yang mengikuti bina keluarga Balita	69	42,6	➔	DPPKBP3A
5.	Cakupan kelas ibu hamil (Ibu mengikuti konseling Gizi dan Kesehatan)	100	100	●	Dinkes

2. Kesehatan dan Gizi Balita

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kesehatan dan Gizi Balita

NO	INDIKATOR	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	STATUS	SUMBER
1.	Cakupan Ibu Hamil (Bumil) kurang energi kronik yang mendapat PMT Pemulihan	95	100	●	Dinkes
2.	Cakupan Bumil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	93	99,8	●	Dinkes
3.	Cakupan Balita Kurus yang mendapat PMT	93	100	●	Dinkes
4.	Cakupan kehadiran di Posyandu (Rasio yang datang terhadap total sasaran)	60	81,2	●	Dinkes
5.	Cakupan anak 6-59 bulan yang mendapat Vitamin A	95	100	●	Dinkes
6.	Cakupan Balita diare yang memperoleh suplementasi Zinc	100	100	●	Dinkes
7.	Cakupan remaja putri mendapatkan TTD	30	69	●	Dinkes

3. Sanitasi

Tabel 2.7 Capaian Indikator Sanitasi

NO	INDIKATOR	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	STATUS	SUMBER
1.	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	100	83,2		Dinkes
2.	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	100	91		Dinkes

4. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.8 Capaian Indikator Pendidikan Anak Usia Dini

NO	INDIKATOR	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	STATUS	SUMBER
1.	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	90	87		Dindik
2.	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (Peserta didik) di PAUD	100	98		Dindik

5. Ketahanan Pangan

Tabel 2.10 Capaian Indikator Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	STATUS	SUMBER
1.	Cakupan keluarga 1000 HPK Kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	100	97		Dinsos
2.	Cakupan Desa menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	61,6	52,5		Dispertan KP

6. Perlindungan Sosial

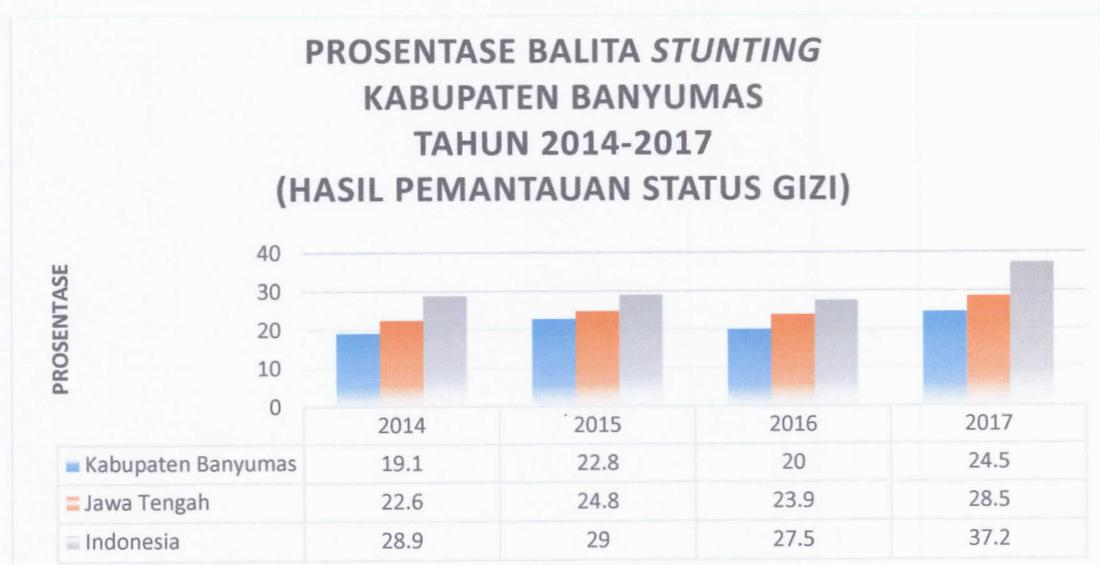
Tabel 2.11 Capaian Indikator Perlindungan Sosial

NO	INDIKATOR	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	STATUS	SUMBER
1.	Cakupan rumah tangga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	100	86,9	→	Dinsos
2.	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan Family Development Session (FDS)/Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga tentang Gizi dan Kesehatan	60	50	→	Dinsos

7. Prevalensi Stunting

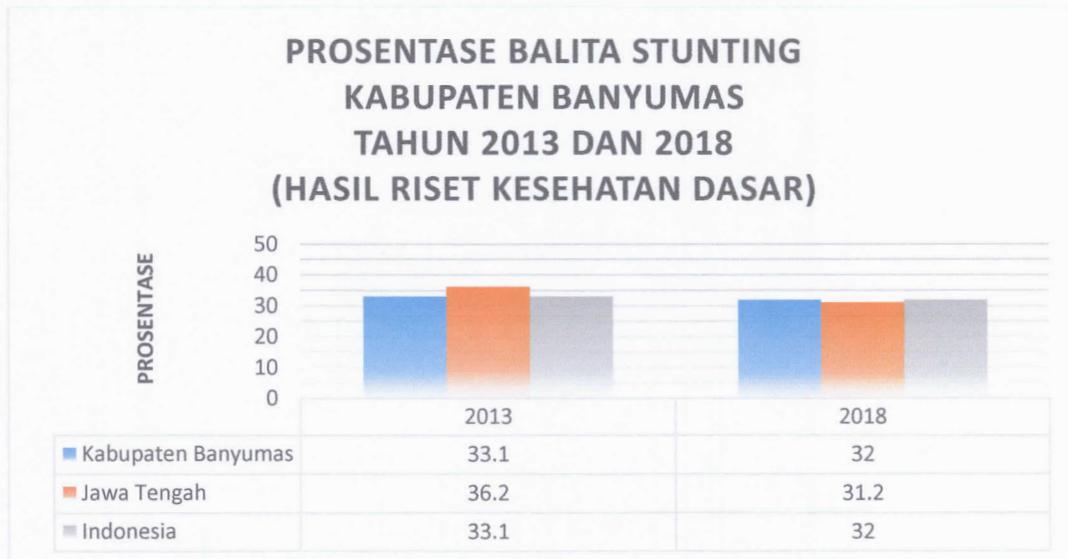
Prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Banyumas cukup fluktuatif setiap tahun, dapat dilihat pada grafik dibawah ini ;

Grafik 2.2 Prosentase Balita Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2017



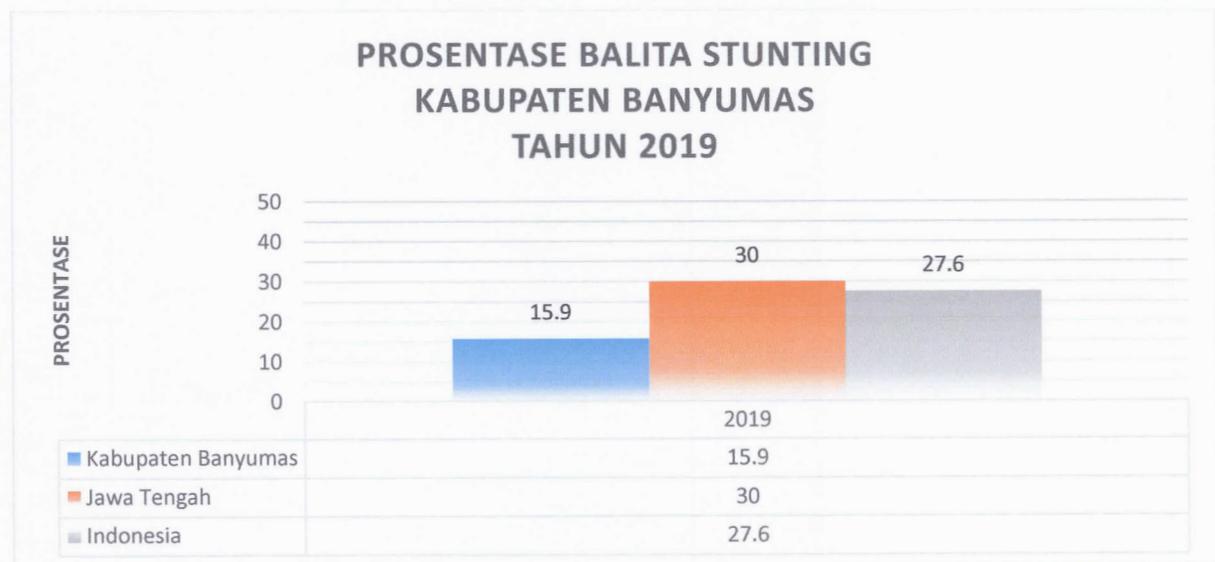
Jika dibandingkan dengan Prevalensi Nasional dan Provinsi maka Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Grafik 2.3 Prosentase Balita *Stunting* Kabupaten Banyumas Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 dan 2018



Untuk hasil Operasi Timbang tahun 2019 angka *stunting* di Kabupaten Banyumas sebesar 15,9% dengan target 18%.

Grafik 2.4 Prosentase Balita *Stunting* Kabupaten Banyumas Hasil Operasi Timbang Tahun 2019



Dari data diatas untuk capaian tahun 2019 dari 20 indikator utama penegahan dan penanganan *stunting* ada 11 indikator yang sudah mencapai target dan 9 indikator yang belum memenuhi target. Indiator yg belum memenuhi target yaitu ;

1. Keluarga yang mengikuti bina keluarga balita
2. Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak
3. Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak
4. Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting
5. Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (Peserta didik) di PAUD
6. Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda
7. Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS Gizi dan Kesehatan
8. Cakupan keluarga 1000 HPK Kelompok miskin sebagai penerima BPNT
9. Cakupan desa menerapkan KRPL

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

1. Komitmen dan visi pimpinan.

Arah kebijakan terkait komitmen dan visi pemimpin adalah terwujudnya komitmen terhadap pencegahan dan penanggulangan *stunting* oleh pemangku kebijakan /pimpinan pemerintahan dan masyarakat. Dengan adanya komitmen ini akan mendorong percepatan penurunan angka *stunting* dan peningkatan sumber daya manusia.

Strategi dengan pembuatan MOU dan penerbitan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting* serta adanya rembug *stunting*.

2. Kampanye nasional berfokus pada peningkatan pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas.

Arah kebijakannya adalah meningkatkan persepsi masyarakat bahwa *stunting* merupakan permasalahan penting pada gizi dan kesehatan serta konsistensi dalam komunikasi perubahan perilaku. Dengan perubahan perilaku ini masyarakat dapat memprioritaskan *stunting* sebagai masalah gizi/kesehatan yang penting dan perubahan perilaku yang dapat menurunkan angka *stunting*.

Strateginya adalah adanya kebijakan kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting*, penyelenggaraan pelatihan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien.

3. Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program Nasional, Daerah dan Masyarakat.

Arah kebijakannya adalah adanya konvergensi /integrasi kegiatan dalam penanggulangan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Konvergensi ini diharapkan mampu mendorong percepatan penurunan *stunting* dan peningkatan sumberdaya manusia khususnya dibidang kesehatan.

Strategi adalah adanya konvergensi/integrasi yang terkoordinir ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; pemanfaatan dana desa untuk kegiatan intervensi gizi prioritas.

4. Mendorong kebijakan “*food nutritional security*”.

Arah kebijakaan ini adalah meningkatkan ketersediaan dan akses pangan dalam rangka pemberian makanan bagi bayi dan balita untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

Strateginya adalah pemberian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), fortifikasi pangan, peningkatan Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan akses prioritas pangan dan gizi.

5. Pemantauan dan evaluasi.

Arah kebijakannya adalah adanya sistem pemantau dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait keberhasilan program dalam penurunan angka *stunting*.

Strateginya adalah adanya publikasi angka prevalensi *stunting*, kajian anggaran dan belanja untuk pencegahan *stunting*, forum kajian tentang *stunting* serta pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantaun/evaluasi.

B. Peran serta Dampak Pencegahan dan Penanggulangan Dalam Pembangunan

I. Dampak *stunting* dalam kecerdasan anak dan kesehatan

Stunting/kerdil tidak hanya berdampak pada tinggi/panjang badan, namun lebih dari itu dampak terhadap kecerdasan anak sangat besar. Pertumbuhan sel otak manusia 80% terbentuk pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimulai saat kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Anak yang mengalami kekurangan asupan zat gizi pada masa itu beresiko mengalami *stunting*, tidak hanya pendek tapi juga kehilangan tingkat kecerdasan / *Intelligence Quotient* rata-rata sebesar 20% lebih rendah dibandingkan anak dengan tinggi/panjang badan normal, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal juga berkembang secara tidak optimal.

Peningkatan risiko obesitas dan penyakit degeneratif peningkatan biaya kesehatan, serta peningkatan kejadian kesakitan dan kematian juga mengancam anak yang mengalami *stunting*. Anak yang mengalami *stunting* akan mudah mengalami kegemukan pada saat sudah dewasa, hal ini karena proporsi tubuh yang tidak ideal, sehingga mudah terjadi penumpukan lemak tubuh. Penyakit degenerative akan meningkat saat dewasa seperti *Diabetes Mellitus*, *Hipertensi*, *Strok*, jantung, asam urat dan lain-lain yang akan meningkatkan resiko angka kesakitan dan angka kematian.

II. Peran dan dampak *stunting* dalam pembangunan

Saat dewasa, anak-anak yang mengalami *stunting* memiliki tingkat pendapatan 20% lebih rendah dibandingkan anak dengan tinggi badan normal. Catatan Bank Dunia (2016) menyatakan bahwa dalam jangka panjang *stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia sebesar Rp.13.000 Triliun, diperkirakan potensi kerugian akibat *stunting* dapat mencapai Rp. 260 - 390 Triliun per tahun.

Investasi negara untuk pencegahan dan penanggulangan masalah *stunting* memiliki keuntungan 48 kali lipat. Artinya jika

Indonesia di tahun 2019 menganggarkan sebesar Rp. 60 T maka dimasa depan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.880 T. Tentunya harus didukung dengan kebijakan dan strategi yang tepat dalam penggunaannya.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020-2023

A. FAKTOR PENENTU STUNTING

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dan penyebab lainnya adalah penyakit/infeksi, perilaku/pola asuh, ketersediaan air bersih dan jamban sehat serta akses terhadap fasilitas kesehatan.



Gambar 4.1 Faktor Multidimensi Penyebab Stunting (World Bank Investing in Early Year Brief , 2016

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi salah satu penentu dalam penyebab *stunting* atau tidaknya karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan otak mencapai 80% dan panjang/tinggi badan mencapai angka 50% dari panjang/tinggi badan saat dewasa. 1000 HPK terdiri dari 270 hari masa kehamilan dan 730 hari yaitu sampai anak berusia 2 tahun. Periode ini sering disebut periode emas, atau dikenal sebagai “*window of opportunity*”. Maknanya adalah kesempatan untuk meningkatkan mutu SDM di masa yang akan datang ternyata sangat sempit, yaitu 1.000 hari.

Rentang 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang sensitif, karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Diketahui bahwa faktor lingkungan sejak konsepsi sampai usia 2 tahun merupakan penyebab terpenting ukuran tubuh pendek, gemuk, dan penyakit degeneratif, dan indikator kualitas hidup lainnya (Hales, 2001). Namun demikian kondisi Pra-hamil juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin, maka wanita usiasubur dan remaja juga menjadi prioritas dalam penanggulangan masalah *stunting*.

Riset Kementerian Kesehatan (Kemkes) tahun 2013, *stunting* bisa disebabkan gizi buruk (40 persen) dan tidak adanya air bersih dan sanitasi buruk (60 persen). Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total.



Gambar 4.2 Penentu Derajat Kesehatan (Teori H.L. BLUM, 1974)

B. INTERVENSI INDIKATOR *STUNTING*

1. PILAR PENANGANAN *STUNTING*

Penanganan *stunting* melibatkan multisektoral dan multidimensi. Ada 20 indikator/pilar utama dalam pencegahan dan penanggulangan masalah *stunting* yaitu :

1. Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan PMT Pemulihan.
2. Cakupan ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.
3. Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT
4. Cakupan kehadiran di Posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran).
5. Cakupan ibu hamil K4
6. Cakupan anak usia 06-59 bulan yang mendapat vitamin A
7. Cakupan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap.
8. Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc.
9. Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah.
10. Cakupan layanan ibu nifas.
11. Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan).
12. Keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB)
13. Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak.
14. Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang layak.
15. Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting.
16. Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD.
17. Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda.

18. Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan.
19. Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).
20. Cakupan desa menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Indikator utama ini melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Bapermas dan KB, Dinsospermades, Dispertan dan KP, Dinas Pendidikan serta Dinas Perkim.

2. INTERVENSI GIZI SPESIFIK

Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Intervensi ini berkontribusi 20-30% dalam pencegahan dan penanggulangan masalah *stunting*.

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas
Kelompok Sasaran 1000 HPK			
Bumil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi bumil dari kelompok miskin/KEK • Suplementasi TTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi kalsium • Pemeriksaan kehamilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dari malaria • Pencegahan HIV
Busui dan anak 0-23 bln	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan konseling menyusui • Promosi dan konseling PMBA • Tata laksana gizi buruk • PMT pemulihan bagi anak kurus • Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan (PPP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi vitamin A • Suplementasi taburia • Imunisasi • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • MTBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan kecacingan

Kelompok Sasaran usia lainnya			
Remaja Putri dan WUS	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi TTD 		
Anak 24-59 bln	<ul style="list-style-type: none"> • Tata laksana gizi buruk • PMT pemulihan bagi anak kurus • Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan (PPP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi vitamin A • Suplementasi taburia • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • MTBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan kecacingan

Tabel 4.1 Ingervensi Gizi Spesifik

Apabila intervensi gizi spesifik melalui upaya sektor kesehatan ditingkatkan cakupannya menjadi 90 persen dari total populasi, tingkat stunting hanya akan turun 20-30 persen. Penurunan ini masih lebih rendah dari target yang ditetapkan WHO melalui *Comperhensive Implementation Plan* (CIP) untuk tahun 2025.

3. INTERVENSI GIZI SENSITIF

Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK.

Tabel 4.2 Ingervensi Gizi Sensitif

JENIS INTERVENSI	PROGRAM/KEGIATAN/INTERVENSI
Peningkatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses Air Minum yang Aman ➤ Akses Sanitasi yang Layak
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) ➤ Akses Jaminan Kesehatan ➤ Akses Bantuan Uang Tunai untuk Keluarga Kurang Mampu (PKH)

Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktek Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyebarluasan informasi melalui berbagai media ➤ Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua ➤ Penyediaan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak ➤ Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja ➤ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Terhadap Akses Pangan Bergizi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu ➤ Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung, terigu, minyak goreng) ➤ Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ➤ Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan

Meningkatkan intervensi gizi sensitif melalui sektor lainnya sangat diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting. Meskipun belum ada bukti yang menghitung estimasi secara tepat kontribusi intervensi gizi sensitif terhadap pengurangan *stunting*, indikasi awal menunjukkan bahwa perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan berkontribusi terhadap percepatan perbaikan gizi (Franzo, 2014).

C. PROGRAM KEGIATAN PENANGANAN *STUNTING*

1. Indikator Utama

Indikator utama merupakan indikator pilar untuk mengetahui keberhasilan program pencapaian. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait memiliki goal/target untuk mencapai *outcome* yang telah ditentukan. Peran serta OPD dijabarkan melalui indikator *output* sebagai berikut :

Tabel 4.3 Indikator Pilar Penanganan Stunting

NO	INDIKATOR	STATUS AWAL (2019)	TARGET (2023)
1	Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan PMT Pemulihan	100	100
2	Cakupan ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	99,8	100
3	Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT	100	100
4	Cakupan kehadiran di Posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)	81,2	85
5	Cakupan ibu hamil K4	100	100
6	Cakupan anak usia 06-59 bulan yang mendapat vitamin A	100	100
7	Cakupan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100	100
8	Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	100	100
9	Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah	69	56
10	Cakupan layanan ibu nifas	100	100
11	Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	100	100
12	Keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB)	42,6	75
13	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	83,2	100
14	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang layak	91	100
15	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	87	97
16	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD	98	100
17	Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	86	100

18	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan	50	80
19	Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	100	97
20	Cakupan desa menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	60	52,5

2. Indikator Target *Stunting*

Tabel 4.4 Indikator Target *Stunting*

Indikator	Dasar 2019 (%)	Target per Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Baduta yang terkena <i>Stunting</i>	14	3.8	3.8	3.5	3.5
Jumlah Balita yang terkena <i>Stunting</i>	32	17	16	15	14.5
Jumlah Baduta <i>Stunting</i> yang ditangani	100	100	100	100	100
Jumlah Balita <i>Stunting</i> yang ditangani	100	100	100	100	100
Jumlah ibu Hamil KEK	12,3	11	10	10	9
Jumlah Ibu Hamil anemia	15,6	15	15	15	10
Jumlah BBLR	6,4	4	4	3	3
Jumlah Balita Gizi Buruk	0,1	0.1	0.1	0.1	0.1

3. Indikator Kegiatan Pendukung

Tabel 4.5 Indikator Program/Kegiatan Pendukung

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
1.	Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat	22
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	6
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	1
			Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	3
		Program Pengembangan Hygiene Sanitasi Dan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	4
		Program Pelayanan Keluarga Berencana	Kegiatan Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan	4
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar Dan Sederajat	Kegiatan Replikasi ProGAS	1
		Program Bimbingan Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Agama	2
2	Aksesibilitas Pangan Beragam	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan	5
			Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan	2
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1
		Program Penguatan Cadangan Pangan	Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan	1
			Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan	5
			Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah	2
		Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran	Kegiatan Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian	3

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Kegiatan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	2
			Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian	2
			Kegiatan DAK Pertanian	2
		Program Perlindungan Tanaman	Kegiatan Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	3
		Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kegiatan Pengembangan perkebunan tanaman tahunan	2
			Kegiatan Pengembangan perkebunan tanaman semusim dan rempah	2
		Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Kegiatan Pengembangan Pertanian Hortikultura	3
			Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	3
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Peternakan	3
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	1
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kegiatan Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner	2
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya	1
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Kegiatan Pengembangan Perikanan Perairan Umum	1
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Komunitas Adat Terpencil	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1
		Program Pengembangan Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan	Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Di Wilayah IHT Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan	1

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
			Kegiatan Gelar Produk Dan Akses Produk Serta Bahan Baku Tingkat Regional Dan Nasional Industri Agro Kimia Dan Hasil Hutan	1
		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	1
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri	Kegiatan Promosi Dagang dan Industri	1
			Kegiatan Monitoring Harga	1
		Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional	1
			Kegiatan Revitalisasi Pasar (DAK)	1
		Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan Irigasi Lainnya	Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi	1
		Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku	1
3	Mutu Dan Keamanan Pangan	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya	4
		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kegiatan Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknik IKM	1
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan pengetahuan Teknologi	1
		Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	Kegiatan Peningkatan Pola Pangan Harapan	2
		Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Pertanian	Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian	2
		Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kegiatan Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan	1
			Kegiatan Peningkatan Gemarikan	1
		Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran	Pengembangan Agribisnis Peternakan	1

N O	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR		
		Produksi Perikanan	Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1		
4	Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan	2		
			Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan	2		
		Program Pendidikan Dasar	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	2		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kepada Masyarakat	1		
			Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata	1		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Fasilitasi Program Kota Adipura	1		
			Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST/ Hanggar/ PDU)	1		
				Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1
				Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan Dan Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Fasilitas Permakanan dan Minuman bagi Lasia Non Potensial dan Balita Terlantar	1
					Kegiatan Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab sosial	1
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak	Kegiatan Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak			1		
Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			4		
	Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat			3		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kegiatan Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa			1		

N O	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah	2
		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Kegiatan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih	1
5	Kelembagaan Pangan Dan Gizi	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	2
		Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	2
			Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD)	1
		Program Pelayanan Keluarga Berencana	Kegiatan Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan	1
		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1
		Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik BPS	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1
		Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	1
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PKK	1
			Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu	1
		Program Peningkatan Kelembagaan Petani	Pengembangan kemampuan Petani dan lembaga petani	1
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	3
			Kegiatan Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	1
		Jumlah indikator		

BAB V

KERANGKA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. KERANGKA KELEMBAGAAN

1. TIM PENGARAH

Penanggung Jawab : a. Bupati Banyumas
b. Wakil Bupati Banyumas

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
Anggota : Kepala Dinas/Kepala Instansi yang menangani :

- a. Kesehatan ;
- b. Pertanian dan Ketahanan Pangan
- c. Pendidikan;
- d. Perikanan dan Peternakan;
- e. Perindustrian dan Perdagangan ;
- f. Pekerjaan Umum;
- g. Lingkungan Hidup ;
- h. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak;
- i. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. Komunikasi dan Informatika;
- l. Kementerian Agama

2. TIM PENYUSUN

a. POKJA I Perbaikan Gizi Masyarakat

Ketua : Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Anggota :

- 1) Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
- 2) Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- 3) Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

- 4) Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- 5) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
- 6) Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas
- 7) Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- 8) Kasi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
- 9) Fungsional Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- 10) Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

b. POKJA II Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam

Ketua : Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

Anggota :

- 1) Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
- 2) Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
- 3) Kabid Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
- 4) Kabid Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
- 5) Kabid Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
- 6) Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
- 7) Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. Banyumas
- 8) Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
- 9) Kabid Ekonomi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

- 10) Kasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
- 11) Kasubid Pertanian dan Pangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 12). Fungsional Perencana pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 13). Fungsional Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

c. POKJA III Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Ketua : Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Anggota :

- 1) Kabid Pengembangan Usaha Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
- 2) Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
- 3) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas
- 4) Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 5) Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
- 6) Kasi Farmasi Makan Minuman dan Pembekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- 7) Kasi Bina Usaha Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
- 8) Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 9) Fungsional Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

d. POKJA IV Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Anggota :

- 1) Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

- 2) Kabid Pemberdayaan Ekonomi, Desa, SDA dan Teknologi Tepat Guna Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
- 3) Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
- 4) Kabid Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
- 5) Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
- 6) Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 7) Kasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- 8) Kasi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
- 9) Kasubid Kesejahteraan Sosial Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 10) Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesejahteraan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- 11) Fungsional Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten. Banyumas

e. POKJA V Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

Ketua : Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

Anggota :

- 1) Kabid Rendalitbang Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 2) Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- 3) Kasubag Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Banyumas
- 4) Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
- 5) Kasubag Perencanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
- 6) Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

- 7) Kasubag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
- 8) Kasubag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
- 9) Kasubag Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
- 10) Kasubag Perencanaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
- 11) Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
- 12) Kasubag Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
- 13) Kasi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
- 14) Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas
- 15) Kasubid Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 16) Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
- 17) Fungsional Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga dapat berperan untuk melaksanakan rencana aksi pencegahan dan penanganan *stunting*. Sektor swasta yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, organisasi PBB (*UN system*), donor, masyarakat madani, dan media.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Uraian berbagai tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan tugas dalam kelembagaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 adalah, sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

- 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 ;
- 2) memberikan arahan dan masukan kepada Tim Penyusun mengenai substansi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 ;
- 3) memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 ;
- 4) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan huruf 3 kepada Bupati Banyumas

b. Tim Penyusun

- 1) melakukan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 sesuai bidang tugasnya ;
- 2) melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 ;
- 3) melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator dalam penentu pencapaian target penurunan *stunting* sesuai dengan tugasnya ;
- 4) menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 sesuai dengan sistematika untuk dikonsolidasikan dengan hasil Kelompok Kerja lainnya ;
- 5) melakukan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 kepada pemangku kepentingan di daerah ;

- 6) mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada Kecamatan guna percepatan pencapaian target penurunan *stunting* ;
- 7) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah.

B. STRATEGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN PERILAKU

Salah satu penyebab utama *stunting* adalah perilaku dalam kesehatan` khususnya dalam pemilihan dan pengolahan makanan. Perubahan perilaku dapat dirubah dengan komunikasi kepada seuruh masyarakat dengan informasi yang tepat. Elemen penting strategi komunikasi memperhatikan analisis kependudukan, status kesehatan, pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan dan perilaku kesehatan.

Kelompok sasaran komunikasi perubahan perilaku mengacu pada Pedoman Nasional Strategi Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2020-2024 yaitu ;

1. Kelompok Primer

Merupakan kelompok sasaran utama yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penanganan *stunting*, yaitu ;

- Ibu Hamil
- Ibu menyusui
- Anak Baduta (0-23 bulan)
- Tenaga Kesehatan
- Kader

2. Kelompok Sekunder

Merupakan kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah dan mengoreksi anak *stunting* dimasa mendatang, yaitu ;

- Wanita Usia Subur (WUS)
- Remaja
- Pengasuh
- Tokoh agama dan masyarakat
- Jejaring social (PKK, Grup Pengajar dan lainnya)

3. Kelompok Tersier

Merupakan pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* yang terdiri dari :

- Pengambil kebijakan (Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah)
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Institusi pendidikan
- Dunia usaha

Pesan kunci dari strategi komunikasi dan perubahan perilaku merupakan poin-poin utama yang disampaikan oleh pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh kelompok sasaran / merupakan panduan utama dalam yang didiskusikan antara pemberi pesan dan sasaran untuk meningkatkan pemahaman dan mempererat hubungan keduanya dalam komunikasi menuju perubahan perilaku. Pesan kunci ini merupakan panduan utama menyusun konten materi komunikasi diberbagai platform (tertulis, verbal, audio visual). Struktur dan dimensi pesan yang akan menjadi panduan utama materi komunikasi dalam implementasi percepatan penurunan stunting mengacu pada Pedoman Nasional Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan *Stunting*.

C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Pelaksanaan Monitoring dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Aspek input yang meliputi sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan peran setiap OPD pelaksana yang terlibat, serta sumber dana yang digunakan.
- b. Aspek Proses yang meliputi tahapan kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur (pedoman) yang ditentukan.
- c. Output yang meliputi capaian hasil kegiatan setelah kegiatan dilakukan tiap tahun.
- d. Dampak yang meliputi perubahan jangka panjang yang dicapai dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Matrik evaluasi perkembangan indikator pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengukur perkembangan proses dan sistem yang direncanakan
- b. Analisis pengumpulan data dan informasi secara periodik serta lebih ditekankan kepada kendala-kendala yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
- c. Mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya.
- d. Mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan.
- e. Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil kegiatan tersebut.
- f. Wawancara dengan responden kunci seperti pejabat, penanggungjawab program dan kegiatan, mengevaluasi dokumen tertulis, meninjau lapangan dan bentuk lainnya jika diperlukan.

3. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing OPD. Adapun mekanisme kerja monitoring dan evaluasi adalah :

- a. Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen monitoring dan evaluasi
- b. Menentukan waktu monitoring, tim dan lokasi.
- c. Melakukan monitoring dengan melihat dampak dari pelaksanaan dan kesesuaian arah pengembangan pelaksanaan RAD- *Stunting*.
- d. Menyiapkan laporan hasil monitoring dan umpan balik tindak lanjutnya.
- e. Evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan *ekternal* evaluasi.
- f. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi
- g. Menyiapkan laporan hasil evaluasi

4. Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan pelaksanaan RAD-*Stunting* perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Pelaporan oleh Tim Penyusun RAD *Stunting* Kabupaten kepada Bupati Banyumas dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan begitu juga untuk pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Prov. Jateng disampaikan setiap 6 (enam) bu

FORM MONEV 1.1 INDIKATOR PILAR RAD PENCEGAHANA DAN PENANGANAN STUNTING (OUTPUT 2020-2023)

No	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan Ibu Hamil (Bumil) kurang energi kronik yang mendapat PMT Pemulihan	Dinkes	100	97		98		99		100	
2	Cakupan Bumil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	Dinkes	99,8	95		97		98		100	
3	Cakupan Balita Kurus yang mendapat PMT	Dinkes	100	95		97		98		100	
4	Cakupan kehadiran di Posyandu (Rasio yang datang terhadap total sasaran)	Dinkes	81,2	60		70		75		80	
5	Cakupan Ibu Hamil K4	Dinkes	100	100		100		100		100	
6	Cakupan anak 6-59 bulan yang mendapat Vitamin A	Dinkes	100	86		87		88		89	
7	Cakupan Bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	Dinkes	100	100		100		100		100	
8	Cakupan Balita diare yang memperoleh suplementasi Zinc	Dinkes	100	100		100		100		100	
9	Cakupan remaja putri mendapatkan TTD	Dinkes	69	50		52		54		56	
10	Cakupan layanan ibu nifas	Dinkes	100	100		100		100		100	
11	Cakupan kelas ibu hamil (Ibu mengikuti konseling Gizi dan Kesehatan)	Dinkes	100	100		100		100		100	
12	Keluarga yang mengikuti bina keluarga balita	DPPKBP3A	42,6	75		75		75		75	
13	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	Perkim	83,2	100		100		100		100	
14	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	Perkim	91	95		100		100		100	
15	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	Dindik	87	90		93		95		97	
16	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (Peserta didik) di PAUD	Dindik	98	100		100		100		100	
17	Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	Dinsos	86,9	100		100		100		100	

18	Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS Gizi dan Kesehatan	Dinsos	50	60		70		75		80	
19	Cakupan keluarga 1000 HPK Kelompok miskin sebagai penerima BPNT	Dinsos	100	80		90		95		97	
20	Cakupan Desa menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Dinpartan KP	60							52,5	

FORM MONEV 1.2 INDIKATOR TARGET STUNTING (OUTPUT 2020-2023)

No	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	CAPAIA N 2020	TARGET 2021	CAPAIA N 2021	TARGET 2022	CAPAIA N 2022	TARGET 2023	CAPAIA N 2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Baduta yang terkena <i>Stunting</i>	14	3.8		3.8		3.5		3.5	
2	Jumlah Balita yang terkena <i>Stunting</i>	32	17		16		15		14.5	
3	Jumlah Baduta <i>Stunting</i> yang ditangani	100	100		100		100		100	
4	Jumlah Balita <i>Stunting</i> yang ditangani	100	100		100		100		100	
5	Jumlah ibu Hamil KEK	12,3	11		10		10		9	
6	Jumlah Ibu Hamil anemia	15,6	15		15		15		10	
7	Jumlah BBLR	6,4	4		4		3		3	
8	Jumlah Balita Gizi Buruk	0,1	0.1		0.1		0.1		0.1	

FORM MONEV 1.3 INDIKATOR PENDUKUNG RAD PENCEGAHANA DAN PENANGANAN STUNTING (OUTPUT 2020-2023)

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT										
A. Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat										
1	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	54	56		58		60		65	
2	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)	61	62		63		64		65	
3	Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT (%)	95	97		98		99		100%	
4	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan (%)	93	95		97		98		100%	
5	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	20	20		15		15		10	
6	Cakupan remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%)		35		40		45		45	
7	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)	40	50		60		70		80%	
8	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT	100	100		100		100		100	
9	Cakupan pemberian MP-ASI pada balita 6 - 24 bulan dari keluarga miskin	100	100		100		100		100	
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100		100		100		100	
11	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita mencapai		16		15		14		13	
12	Prevalensi balita gizi buruk	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	
13	Prevalensi balita gizi kurang	7.8	7.7		7.6		7.5		7.4	
14	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)	5	4.0		4		3		3	
15	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/ hari	71	70		68		66		64	

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5% (%)	70	72		75		78		80	
17	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun)	14	3.8		3.8		3.5		3.5	
18	Prevalensi balita stunting	18	17.0		16		15		14,5	
19	Persentase baduta stunting	4	3.8		3.8		3.5		3.5	
20	Persentase balita overweight	2	2.0		2		2		2	
21	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	81,2	60		70		75		80	
22	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium (%)	98,6	82		84		86		88	
B. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK										
B.1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak										
1	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	100%	100		100		100		100	
2	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) (%)	100	100		100		100		100	
3	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (%)	100%	100		100		100		100	
4	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%)	100%	100		100		100		100	
5	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100		100		100		100	
6	Persentase Puskesmas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (%)	100%	100		100		100		100	

C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT										
C.1 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah										
1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100	100		100		100		100	
C.2 Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular										
1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)	50	60		70		80		85	
2	Persentase kecamatan yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah (%)	50	55		60		65		70	
3	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 th	12.2	12.1		12.0		11.9		11.8	
D. PROGRAM PENGEMBANGAN HYGIENE SANITASI DAN KESEHATAN MASYARAKAT										
D.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga										
1	Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	60	75		85		95		100	
2	% kualitas air minum dilakukan pengawasan	50	58		65		72		80	
3	% rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	100	100		100		100		100	
4	Proporsi tempat umum yang memenuhi syarat (%)	74	75		78		79		80	
E. PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA										
E.1 Kegiatan Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan										
1	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	68	69		69		70		70	
2	Persentase kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	58	59		59		70		70	
3	Persentase kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	80,8	81,8		81,8		82,3		82,8	
4	UPPKS (Aktif)	409	436		467		494		521	

F. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT									
F.1 Kegiatan Replikasi ProGAS									
1	Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (PROGRAS) (piloting) (%)	1500 siswa	1700 siswa		2000 siswa		2200 siswa		2500 siswa
G. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT									
G.1 Kegiatan Pembinaan Agama									
1	Bimbingan Perkawinan calon pengantin	1,360	1,360		1,360		1,360		1,360
2	Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi remaja Usia Nikah (keg)	110	110		110		110		110
II PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM									
A. PROGRAM PENINGKATAN POLA PANGAN HARAPAN									
A.1 Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan									
1	Skor pola pangan harapan (%)	90.90	91.30		91,35		91,76		91,81
2	Ketersediaan energi perkapita (%)	92.00	93.00		94.00		95.00		96.00
3	Ketersediaan protein perkapita (%)	92.00	93.00		94.00		95.00		96.00
4	Konsumsi energi perkapita perhari (Kkal)	2,401	2,406		2,411		2,416		2,421
5	Konsumsi protein perkapita perhari (gram)	48.15	50.35		52.55		54.8		57.0
A.2 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan									
1	luas pekarangan yang digunakan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan (m2)	3,000	4000		4200		4400		4600
2	Jumlah keragaman komoditas pangan (jenis)								
A.3 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan									
1	Pengawasan dan pembinaan pangan (%)	71	72		73		74		75

B. PROGRAM PENGUATAN CADANGAN PANGAN									
B.1 Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan									
1	Penanganan daerah rawan pangan (%)	63	64		65		66		67
B.2 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan									
1	Peningkatan jumlah desa mandiri pangan dan peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat	4.00	6.00		6.00		8.00		8.00
2	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	96.00	97.00		98.00		99.00		100.00
3	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)	96.00	97.00		98.00		99.00		100.00
4	Jumlah Lumbung Pangan (unit)	23.00	27.00		27.00		28.00		28.00
5	Jumlah Desa Mandiri Pangan (unit)	22.00	25.00		26.00		26.00		27.00
B.3 Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah									
1	Penguatan Cadangan Pangan (%)	75.00	80.00		82.00		84.00		86.00
2	Ketersediaan pangan utama	90.00	95.00		96.00		96.00		97.00
C. PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERTANIAN									
C.1 Kegiatan Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian									
1	Prosentase kenaikan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pemasaran produksi pertanian (%)	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00
2	Jumlah pelaku usaha agribisnis (unit)	280.00	308.00		338.80		372.68		409.95
3	Tersedianya akses promosi produk pertanian (kali)	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00

D. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN									
D.1 Kegiatan Pengembangan Mekanisasi Pertanian									
1	Prosentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi (%)	20.00	20.00		20.00		20.00		100.00
2	Tersedianya Alat Mesin Pertanian (unit)	13,052	13,313		13,574		13,835		14,096
D.2 Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian									
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Ha)	800.00	850.00		900.00		950.00		1000,0
2	Pembangunan Jalan Produksi (meter)	5,000.00	5.000.00		5,000.00		5,000.00		5000,0
D.3 Kegiatan DAK Pertanian									
1	Pembangunan embung (unit)	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00
2	Pembangunan Sumber Air Tanah Dangkal/ Dalam (Unit)	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00
E. PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN									
E.1 Kegiatan Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)									
1	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Padi	2.57	2.28		2.00		1.71		1.43
2	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Jagung	0.33	0.22		0.11		0.07		0.02
3	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Kedelai	8.10	7.09		6.07		5.06		4.05

F. PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA									
F.1 Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan									
1	Produksi padi (ton)	400,000	425,000		450,000		475,000		500,000
2	Produksi jagung (ton)	13,267	13,400		13,534		13,667		13,806
3	Produksi kedelai (ton)	1,593,41	1,609,34		1,625.43		1,641.69		1,658.11
G. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN									
G.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Peternakan									
1	Jumlah produksi daging	21,706	22,357		23,078		23,719		24,431
2	Jumlah produksi telur	17,208	17,724		18,256		18,804		19,368
3	Jumlah produksi susu	3,748,000	3,860,000		3,976,000		4,095,000		4.218.000
H. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN									
H.1 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna									
1	Prosentase Kelompok Ternak Terlatih Yang Menerapkan Teknologi	150 Org	200 Org		200 Org		250 Org		250 Org

I. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK									
I.1 Kegiatan Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner									
1	Jumlah produsen pangan asal hewan yang mempunyai ijin operasional (bersertifikat) NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Unit)	3,00	4,00		5,00		6,00		7,00
2	Jumlah sampel Produk Hewan yang di uji di Balai Pelayanan Kesmavet (sampel)	400	425		450		475		500
J. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN									
J.1 Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya									
1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (ton)	10,30	10,45		10,6		10,75		10,9
K. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR									
K.1 Kegiatan Pengembangan Perikanan Perairan Umum									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	885	898		912		926		936
L. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL									
L.1 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin									
1	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH (keluarga)	325 pdp; 27 Kec	325 pdp; 27 kec		325 pdp; 27 kec		325 pdp; 27 kec		325 pdp; 27 kec

M. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI									
M.1 Kegiatan Promosi Dagang dan Industri									
1	Jumlah industri kecil dan menengah yang difasilitasi promosi produk (IKM)	42	43	44	45	46			
M.2 Kegiatan Monitoring Harga									
1	Termonitoringnya distributor dan pengecer barang pokok dan barang penting lainnya (bulan)	12	12	12	12	12			
N. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan									
N.1 Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional									
1	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/ pasar rakyat (unit)	4	4	4	4	4			
O. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA SERTA JARINGAN IRIGASI LAINNYA									
O.1 Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi									
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (ha)	71,6%	73,1%	74,6%	76,1%	77,6%			
P. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU									
P.1 Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku									
1	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (jt m3)	70%	73	79	83	87			

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN										
III										
A. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN										
A.1 Kegiatan Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya										
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (Sampel)	20	25		30		35		50	
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	95	95		95		96		96	
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (%)	75	75		75		75		75	
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (%)	100	100		100		100		100	
B. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										
1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknik IKM	90 IKM	120		120		130		130	
C. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI										
1	Meningkatnya Ketrampilan dan pengetahuan Teknologi Industri	20 IKM	20		20		20		20	
D. PROGRAM PENINGKATAN POLA PANGAN HARAPAN										
1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	10.00	10.00		2.00		2.00		2.00	
2	Pengawasan dan pembinaan pangan (%)	93,43	94,43		95,43		96,43		97,43	
E. PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERTANIAN										
E.1 Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian										
1	Jumlah pelaku usaha agribisnis (unit)	280.00	308.00		338.80		372.68		409.95	
2	Tersedianya akses promosi produk pertanian (kali)	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00	

F. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										
F.1 .Kegiatan Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan										
1	Jumlah UPI yang mempunyai SKP (Unit)	2	3		4		5		6	
F.2 Kegiatan Peningkatan Gemarikan										
1	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	14,38	14,42		14,47		14,52		14,57	
G. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										
G.1 Pengembangan Agribisnis Peternakan										
1	Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklamsar) hasil peternakan yang terlatih	16	16		16		16		16	
G.2 Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Peternakan										
1	Persentase Kelompok Usaha Peternakan berijin	10	10		10		10		10	

FORM MONEV 1.3 INDIKATOR PENDUKUNG RAD PENCEGAHANA DAN PENANGANAN STUNTING (OUTPUT 2020-2023)

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT									
	A.PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
	A.1 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan									
1	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber-PHBS) (%)	80%	81%		81.00%		81.50%		82%	
2	Peningkatan mutu desa siaga – Proporsi desa/ kelurahan siaga aktif mandiri (%)	10%	15%		20%		25%		30%	
	A.2 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan									
1	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik (kali)	6	6		8		8		10	
2	Jumlah penyuluhan melalui media cetak (kali)	10,500	10,700		11,000		11,500		12,000	
	B. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR									
	B.1 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan									
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Dokter Kecil (kab/kota)	27	27		27		27		27	
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Kader Kesehatan Remaja (kab/kota)	27	27		27		27		27	
	C. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
	C.1 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kepada Masyarakat									
1	Jumlah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilahan dan pengelolaan sampah	100 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang	
	C.2 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata									
1	Jumlah Sekolah yang berwawasan lingkungan sehat dan bersih (adiwiyata)	100 Sekolah	100 Sekolah		100 Sekolah		100 Sekolah		100 Sekolah	

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
D.1 Kegiatan Fasilitas Program Kota Adipura									
1	Jumlah kecamatan yang turut serta dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat (Adibuana Bakti)	23 Kec	23 Kec		23 Kec		23 Kec		23 Kec
D.2 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST/Hanggar/PDU)									
1	Jumlah kecamatan yang terlayani Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST/Hanggar/PDU)	5	5		5		5		5
E. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP									
E.1 Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan									
1	Jumlah Warga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Budaya Bersih Lingkungan (Desa)	23 Desa	23 Desa		23 Desa		23 Desa		23 Desa
F. PROGRAM PELAYANAN PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL									
F.1 Kegiatan Fasilitas Permakanan dan Minuman bagi Lasisa Non Potensial dan Balita Terlantar									
1	Tersedianya bantuan makanan dan minuman bagi lansia dan balita terlantar	200 org	250 orang		3000 orang		350 orang		400 orang
F.2 Kegiatan Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab sosial									
1	Jumlah Penjaringan melalui TRC pada PMKS Jumlah Tuna Sosial, PGOT yang terjaring dan terehabilitasi (orang)	400 org	425 orang		450 orang		475 orang		500 orang

G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK									
G.1 Kegiatan Penguatan kelembagaan dan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak									
1	Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak (%)	80%	80%		80%		90%		90%
H. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI									
H.1 Kegiatan Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa									
1	Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah terkait Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui :								
	a. Melalui radio lokal (kali)	160	160		160		160		160
	b. Melalui televisi lokal (kali)	0	0		0		0		0
	c. Melalui konten cetak (lembar)	6000 buku	6000 buku		6000 buku		6000 buku		6000 buku
	d. Penyusunan Data Dan Informasi Kabupaten Banyumas	400	400		200		200		200
I. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN									
I.1 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah									
1	Jumlah Kecamatan terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja / IPLT (Kecamatan)	4	4		7		7		7
2	Jumlah Kecamatan terlayani Instalasi Air Limbah (IPAL) (Kecamatan)	6	6		6		6		6
J. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH									
J.1 Kegiatan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih									
1	Jumlah Sambungan Rumah Air Minum								

FORM MONEV 1.3 INDIKATOR PENDUKUNG RAD PENCEGAHANA DAN PENANGANAN STUNTING (OUTPUT 2020-2023)

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI									
	A. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN									
	A.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan									
1	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)	39	40		40		40		40	
2	Rasio Jumlah Tenaga Gizi dan Puskesmas	100	100		100		100		100	
	B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL									
	B.1 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)									
1	Jumlah Kecamatan yang telah mempunyai dan menerapkan Perda GAKY (Kab/Kota)	27	27		27		27		27	
2	Jumlah Kecamatan yang telah membentuk Tim GAKY	27	27		27		27		27	
	B.2 Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD)									
1	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam upaya penganggulangan kemiskinan (Rakor TKPK)	12	12		12		12		12	
VI	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA									
	A. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan									
1	Presentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif	274	302		328		355		382	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH									
	A. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan									
1	Jumlah UKM yang membuat makanan olahan.	120 UKM	150		180		210		240	

FORM MONEV 1.3 INDIKATOR PENDUKUNG RAD PENCEGAHANA DAN PENANGANAN STUNTING (OUTPUT 2020-2023)

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAAN INFORMASI STATISTIK BPS										
A. Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik										
1	Jumlah publikasi/laporan statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN (buku)	400 buku	400 buku		400 buku		400 buku		400 buku	
IX PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI										
A. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas										
1	Monitoring/Advokasi penyusunan RAD Stunting Kab/Kota	14 OPD , 27 Kec	14 OPD ,27 Kec		14 OPD ,27 Kec		14 OPD ,27 Kec		14 OPD , 27 Kec	
X PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT										
A. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PKK										
1	Persentase/Jumlah TPPKK yang dibina untuk melaksanakan kegiatan kebun gizi/toga di Kecamatan *(Lokasi)	331 Desa	331 Desa		331 Desa		331 Desa		331 Desa	
B. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu										
1	Persentase/jumlah capaian pembentukan posyandu integrasi di Kecamatan (unit)	6 Desa/ kel	8		10		12		14	

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN										
XI	A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian									
1	Prosentase penyuluh pertanian terlatih (%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Penyuluh Pertanian (orang)	187.00	187.00		187.00		187.00		187.00	
3	Jumlah Penyuluh pertanian yang terlatih (orang)	187.00	187.00		187.00		187.00		187.00	
B. Kegiatan Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan										
1	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Model (unit)	4.00	4		4		4		4	

FORM MONEV 2.1 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAD STUNTING TAHUN

No	Program	Kegiatan	TAHUN 2019			Realisasi	
			DIPA	Anggaran (Rp. .000)			
				APBD Kab.	APBD Prov		APBN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN						
	A. Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat			490,450		975,000	
1		Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)		5,500			
2		Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)					
3		Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT (%)		140,000			
4		Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan (%)					
5		Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)					
6		Cakupan remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%)					
7		Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)		140,000			
8		Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT					
9		Cakupan pemberian MP-ASI pada balita 6 - 24 bulan dari keluarga miskin					
10		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan					
11		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita mencapai 17 % (%)		29,450			
12		Prevalensi balita gizi buruk					
13		Prevalensi balita gizi kur ang					

14	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)					
15	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/ hari					
16	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5% (%)		90,000			
17	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun)		30,000			
18	Prevalensi balita stunting					
19	Persentase baduta stunting					
20	Persentase balita overweight					
21	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)		5,500			
22	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium (%)				975,000	
B.Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak			40,000		-	
1	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM		10,000			
2	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) (%)					
3	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (%)		10,000			
4	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%)		10,000			
5	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil					
6	Persentase Puskesmas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (%)		10,000			
C.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit						
C.1 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah			110,000		-	
1	Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap					

C.2 Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		350,000			
1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)				
2	Persentase kecamatan yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah (%)				
3	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 th				
D. Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat					
D.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga		119,000		-	
1	Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	60,000			
2	% kualitas air minum dilakukan pengawasan	35,000			
3	% rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	24,000			
4	Proporsi tempat tempat umum yang memenuhi syarat (%)	7,200			
E. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN					
E.1 .Kegiatan Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya					
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (Sampel)	10,000			
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	150,000			
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (%)	10,000			
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (%)				

	F. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					
	F.1 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang					
	1	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber-PHBS) (%)	45,000			
	2	Peningkatan mutu desa siaga Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri (%)	183,250			
	F.2 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan					
	1	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik (kali)	20,000			
	2	Jumlah penyuluhan melalui media cetak (kali)	35,000			
	G. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan					
	1	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)				
	2	Rasio Jumlah Tenaga Gizi dan Puskesmas				
II	DINAS DPPPKB DAN P2A					
	A. PROGRAM PELAYANAN KB					
	1	Presentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	200,000		10,000	
	2	Presentase kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif				
	3	Presentase kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif				
	4	UPPKS (Aktif)				
	B. Kegiatan Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak					
	1	Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak (%)	400,000			

	C. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan					
1	Presentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) aktif		100,000	4,000	10,000	
2	Presentase kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif					
3	Presentase kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif					
4	UPPKS (aktif)					
III	DINAS PENDIDIKAN					
	A. Kegiatan Replikasi ProGAS					
1	Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (PROGRAS)(piloting) (%)		50,000		2,250,000	
	B.PROGRAM PENDIDIKAN DASAR					
	B.1 Kegiatan koordinasi Pembinaan Kesiswaan					
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Dokter Kecil (kab/kota)		15,000			
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Kader Kesehatan Remaja (kab/kota)		25,000			
IV	KEMENTRIAN AGAMA					
	A.Kegiatan Pembinaan Agama					
1	Bimbingan Perkawinan calon pengantin				225,000	
2	Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi remaja Usia Nikah (keg)				25,000	

V	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
	A. PROGRAM PENINGKATAAN PPH					
	A.1 Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan			500,000		
	1	Skor pola pangan harapan (%)				
	2	Ketersediaan energi perkapita (%)				
	3	Ketersediaan protein perkapita (%)				
	4	Konsumsi energi perkapita perhari (Kkal)				
	5	Konsumsi protein perkapita perhari (gram)				
	A.2 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan			300,000		
	1	luas pekarangan yang digunakan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan (m2)				
	2	Jumlah keragaman komoditas pangan (jenis)				
	A.3 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			100,000		
	1	Pengawasan dan pembinaan pangan (%)				
	B. PROGRAM PENGUATAN CADANGAN PANGAN					
	B.1 Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan					
	1	Penanganan daerah rawan pangan (%)		250,000		
	B.2 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan					
	1	Peningkatan jumlah desa mandiri pangan dan peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat		700,000		
	2	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)		150,000		

3	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)		150,000			
4	Jumlah Lumbung Pangan (unit)		200,000			
5	Jumlah Desa Mandiri Pangan (unit)		200,000			
B.3 Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah						
1	Penguatan Cadangan Pangan (%)		350,000			
2	Ketersediaan pangan utama		200,000			
C. PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERTANIAN						
C.1 Kegiatan Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian						
1	Prosentase kenaikan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pemasaran produksi pertanian (%)		300,000			
2	Jumlah pelaku usaha agribisnis (unit)					
3	Tersedianya akses promosi produk pertanian (kali)					
D. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian						
D.1 Kegiatan Pengembangan Mekanisasi Pertanian						
1	Prosentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi (%)		23,469			
2	Tersedianya Alat Mesin Pertanian (unit)		4,491,000			
D. 2 Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian						
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Ha)		1,200,000			
2	Pembangunan Jalan Produksi (meter)		4,500,000			

D.3 Kegiatan DAK Pertanian			3,000,000			
1	Pembangunan embung (unit)		1,500,000			
2	Pembangunan Sumber Air Tanah Dangkal/ Dalam (Unit)		1,500,000			
E. PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN						
E.1 Kegiatan Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)			250,000			
1	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Padi (%)					
2	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Jagung (%)					
3	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Kedelai (%)					
F. Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura						
F.1 Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan			500,000			
1	Produksi padi (ton)					
2	Produksi jagung (ton)					
3	Produksi kedelai (ton)					
G. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian				100,000		
1	Prosentase penyuluh pertanian terlatih (%)					
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Penyuluh Pertanian (orang)					
3	Jumlah Penyuluh pertanian yang terlatih (orang)					
H. Kegiatan Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan						
1	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Model (unit)		2,000,000			

VI	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN				
	A. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
	A.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Peternakan		200,000		
1	Jumlah produksi daging				
2	Jumlah produksi telur				
3	Jumlah produksi susu				
	B. Program Penerapan Teknologi Pertanian				
	B.1 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna		85,000		
1	Prosentase Kelompok Ternak Terlatih Yang Menerapkan Teknologi			-	-
	C. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				
	C.1. Kegiatan Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner		175,000		
1	Jumlah produsen pangan asal hewan yang mempunyai ijin operasional (bersertifikat) NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Unit)				
2	Jumlah sampel Produk Hewan yang di uji di Balai Pelayanan Kesmavet (sampel)				
	D. Program Pengembangan Budidaya Perikanan				
	D.1. Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya				
1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (ton)				
	E. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				
	E.1 Kegiatan Pengembangan Perikanan Perairan Umum				
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				

F. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					
F. 1 Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan					
1	Jumlah UPI yang mempunyai SKP (Unit)		150,000	750	750
F.2. Kegiatan Peningkatan Gemarikan					
1	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)		200,000		
G.Pengembangan Agribisnis Peternakan					
1	Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih		120,000		
H.Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Peternakan					
1	Persentase Kelompok Usaha Peternakan berijin		150,000		
VII	DINSOS PERMADES				
A. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil					
A.1 Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin					
1	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH (keluarga)		644,000	168.315; 840.000	
B. Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial					
B.1 Kegiatan Fasilitas Permakanan dan Minuman bagi Lansia Non Potensial dan Balita Terlantar					
1	Tersedianya bantuan makanan dan minuman bagi lansia dan balita terlantar		100,000		
B.2 Kegiatan Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab sosial					
1	Jumlah Penjaringan melalui TRC pada PMKS Jumlah Tuna Sosial, PGOT yang terjaring dan terehabilitasi (orang)		800,000		

	C. Program Kegiatan Keberdayaan Masyarakat				
	C.1 Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK				
1	Persentase/Jumlah TPPKK yang dibina untuk melaksanakan kegiatan kebun gizi/ toga di Kecamatan *(Lokasi)		900,000		
	C.2 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu				
1	Persentase/jumlah capaian pembentukan posyandu integrasi di Kecamatan (unit)		150,000		
VIII	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	A. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri				
	A.1 Kegiatan Promosi Dagang dan Industri				
1	Jumlah industri kecil dan menengah yang difasilitasi promosi produk (IKM)		350,000	0	
	A.2 Kegiatan Monitoring Harga				
1	Termonitoringnya distributor dan pengecer barang pokok dan barang penting lainnya (bulan)		200,000	0	
	B. Program Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan				
	B.1 Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional				
1	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/ pasar rakyat (unit) pasar rakyat)		20,000,000	0	
	B.2 Kegiatan Revitalisasi Pasar (DAK)				
1	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/ pasar rakyat (unit pasar rakyat)		0	10,000,000	

	C. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan					
1	Jumlah UKM yang membuat makanan olahan.		140,000			
IX	DINAS PEKERJAAN UMUM					
	A. Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi					
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (ha)		20,000,000		7,000,000	
	B. Program Penyedia Dan Pengelolaan Air Baku					
	B.1 Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku					
1	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (jt m3)		20,000,000			
	C. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
	C.1 Kegiatan Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih					
1	Jumlah sambungan rumah air minum		2.082.000			
X	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	A. Program Pengembangan Industri Kecil da Menengah					
1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknik IKM		1,000,000.			
	B. Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri					
1	Meningkatnya Ketrampilan dan pengetahuan Teknologi Industri		60,000.00			

XI DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
A. Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kepada Masyarakat			2,000,000	0	0	
1	Jumlah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilahan dan pengelolaan sampah					
B. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata			250,000	0	0	
1	Jumlah Sekolah yang berwawasan lingkungan sehat dan bersih (adiwiyata)					
C. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pesampahan						
C.1 Kegiatan Fasilitasi Program Kota Adipura			1,900,000			
1	Jumlah kecamatan yang turut serta dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat (Adibuana Bakti)					
C.2. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST/Hanggar/PDU)			10,000,000			
1	Jumlah kecamatan yang terlayani Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST/Hanggar/PDU)					
D. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan			500,000	0	0	
1	Jumlah Warga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Budaya Bersih Lingkungan (Desa)					

XII DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
A. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			2,000,000	0	0	
1	Jumlah siswa yang mengikuti Popda SD/SMP/SMA di Kab. Banyumas (orang)		550,000	0	0	
2	Pengiriman pelajar mengikuti Popda SD/SMP/SMA ex Karisidenan		150,000	0	0	
3	pengiriman pelajar mengikuti Popda SD/SMP/SMA di Provinsi (orang)		1,000,000	0	0	
4	pengiriman atlet mengikuti even-even dari tingkat provinsi s/d nasional		300,000	0	0	
XIII DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
A. Kegiatan Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa						
A.1 Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah terkait Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui :						
	Melalui radio lokal (kali)		24,000			
	Melalui televisi lokal (kali)		20,000			
	Melalui konten cetak (lembar)		20,000			
	Penyusunan Data Dan Informasi Kabupaten Banyumas		200,000			
B. Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik						
1	Jumlah publikasi/laporan statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN (buku)		200,000			

XIV	DINAS PEUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	A. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah		200,000			
	1	Jumlah Kecamatan terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja / IPLT (Kecamatan)				
	2	Jumlah Kecamatan terlayani Instalasi Air Limbah (IPAL) (Kecamatan)	7,845,000			
XV	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	A. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)		50,000	100,000		
	1	Jumlah Kecamatan yang telah mempunyai dan menerapkan Perda GAKY (Kab/Kota)				
	2	Jumlah Kecamatan yang telah membentuk Tim GAKY				
	B. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD)					
	1	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam upaya penganggulangan kemiskinan (Rakor TKPK)	200,000			
	C. Analisa Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas					
	1	Monitoring/Advokasi penyusunan RAD Stunting Kab/Kota	100,000			

FORM MONEV 2.2 : UMPAN BALIK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-STUNTING

PILAR	HASIL ANALISA	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)
Pilar 1: Komitmen dan Visi Kepemimpinan		
Pilar 2: Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku		
Pilar 3: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa;		
Pilar 4: Ketahanan Pangan dan Gizi		
Pilar 5 : Pemantauan dan Evaluasi		

CARA PENGISIAN LAPORAN LAMPIRAN 1

FORM MONEV 1.1: INDIKATOR KINERJA UTAMA/OUTPUT RAD-STUNTING 2020 -2023

Kolom 1 diisi dengan indikator kinerja utama sesuai dengan tahun pelaporan.

Kolom 2 diisi dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.

Kolom 3 diisi dengan target sesuai dengan tahun pelaporan.

Kolom 4 diisi dengan capaian sesuai dengan tahun pelaporan.

FORM MONEV 1.2: INDIKATOR TARGET RAD-STUNTING 2020 -2023

Kolom 1 diisi dengan indikator kinerja utama sesuai dengan tahun pelaporan.

Kolom 2 diisi dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.

Kolom 3 diisi dengan target sesuai dengan tahun pelaporan.

Kolom 4 diisi dengan capaian sesuai dengan tahun pelaporan.

FORM MONEV 1.3: INDIKATOR PENDUKUNG RAD-STUNTING 2020 -2023

Kolom 1 diisi dengan indikator kinerja utama sesuai dengan tahun pelaporan.

Kolom 2 diisi dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.

Kolom 3 diisi dengan target sesuai dengan tahun pelaporan.

Kolom 4 diisi dengan capaian sesuai dengan tahun pelaporan.

FORM MONEV 2.1 : PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAD-STUNTING

Kolom 1 diisi dengan pilar pembangunan pangan dan gizi

Kolom 2 diisi dengan Perangkat Daerah yang mengalami masalah atau menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan pada setiap pilar.

Kolom 3 diisi dengan kategori masalah sesuai dengan identifikasi masalah. Kategori tersebut bisa dipilih lebih dari satu. Pilihan kategori diantaranya adalah : (a) Keuangan, (b) Organisasi, (c) Regulasi, (d) Operasional, (e) Politik, dan (e) Lainnya

- Kolom 4 diisi dengan deskripsi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program untuk mencapai masing-masing target.
- Kolom 5 diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah baik untuk Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
- Kolom 6 diisi dengan informasi tambahan yang dirasa perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 3,4 dan 5.

FORM MONEV 2.2 : UMPAN BALIK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-STUNTING

- Kolom 1 diisi dengan pilar pembangunan pangan dan gizi.
- Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Monev 2.1, Form Monev 2.2, Form Monev 2.3. Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke Perangkat Daerah mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
- Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.

FORM MONEV 2.3 FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN

- Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurut untuk mendeskripsikan banyaknya Perangkat Daerah beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Kolom 2 diisi dengan Perangkat Daerah terkait RAD-PG yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada Form Monev 2.2
- Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.
- Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang danganan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
- Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6

No	Program/Kegiatan Kabupaten Banyumas	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023			Instansi/SKPD/ Urusan					
			Target Capaian	Anggaran (Rp. .000)			Target Capaian	Anggaran (Rp. .000)			Target Capaian	Anggaran (Rp. .000)			Target Capaian	Anggaran (Rp. .000)							
				APBD Kab.	APBD Prov	APBN		APBD Kab.	APBD Prov	APBN		APBD Kab.	APBD Prov	APBN		APBD Kab.	APBD Prov		APBN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
1	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT																						
	A. Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat			490,450		975,000		539,450		975,000		590,450		975,000		538,450		975,000		660,450		Dinkes	
1	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)		54	5,500			56	5,500			58	5,500			60	5,500			65	5,500		Dinkes	
2	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)		61				62				63				64				65			Dinkes	
3	Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT (%)		95%	140,000			97%	150,000			98%	160,000			99%	170,000			100%	180,000		Dinkes	
4	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan (%)		93%				95%				97%				98%				100%			Dinkes	
5	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)		20				20				15				15				10			Dinkes	
6	Cakupan remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%)						35				40				45				45			Dinkes	
7	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)		40%	140,000			50%	150,000			60%	160,000			70%	170,000			80%	180,000		Dinkes	
8	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT		100				100				100				100				100			Dinkes	
9	Cakupan pemberian MP-ASI pada balita 6 - 24 bulan dari keluarga miskin		100				100				100				100				100			Dinkes	
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100				100				100				100				100			Dinkes	
11	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita mencapai 17 % (%)		39 kali	29,450			39 kali	29,450			39 kali	29,450			39 kali	29,450			39 kali	29,450		Dinkes	
12	Prevalensi balita gizi buruk		0.1				0.1				0.1				0.1				0.1			Dinkes	
13	Prevalensi balita gizi kurang		7.8				7.7				7.6				7.5				7.4			Dinkes	
14	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)		5				4.0				4				3				3			Dinkes	
15	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/ hari		71				70				68				66				64			Dinkes	
16	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5% (%)		70%	90,000			72%	92,000			75%	95,000			78%	97,000			80%	100,000		Dinkes	
17	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun)		50 kali	30,000			55 kali	32,000			60 kali	35,000			65 kali	37,000			70 kali	40,000		Dinkes	
18	Prevalensi balita stunting		18				17.0				16				15				14,5			Dinkes	
19	Persentase baduta stunting		4				3.8				3.8				3.5				3.5			Dinkes	
20	Persentase balita overweight		2				2.0				2				2				2			Dinkes	
21	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)		2 kali	5,500			2 kali	5,500			2 kali	5,500			2 kali	5,500			2 kali	5,500		Dinkes	
22	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium (%)					975,000	82			975,000	84			975,000	86			975,000	88		975,000	Dinkes	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28							
B. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK																														
B.1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak				40,000			-		60,000			-		80,000			90,000			96,000			-	Dinkes						
1	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	100%		10,000			100%		15,000			100%		20,000			100%		24,000			100%		24,000	Dinkes					
2	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) (%)	100					100				100					100.00			100.00					Dinkes						
3	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (%)	100%		10,000			100%		15,000			100%		20,000			100%		24,000			100%		24,000	Dinkes					
4	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%)	100%		10,000			100%		15,000			100%		20,000			100%		24,000			100%		24,000	Dinkes					
5	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100					100				100					100.00			100.00					Dinkes						
6	Persentase Puskesmas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (%)	100%		10,000			100%		15,000			100%		20,000			100%		24,000			100%		24,000	Dinkes					
C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT																														
C.1 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah				110,000			-		120,000			-		125,000			130,000			130,000			-	Dinkes						
1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%		110,000			100%		120,000			100%		125,000			100%		130,000			100%		130,000	Dinkes					
C.2 Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				350,000					360,000					370,000			380,000			390,000					Dinkes					
1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)	50%					60%				70%					80%			85%					Dinkes						
2	Persentase kecamatan yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah (%)	50%					55%				60%					65%			70%					Dinkes						
3	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 th	12.20%					12.10%				12.00%					11.90%			11.80%					Dinkes						
D. PROGRAM PENGEMBANGAN HYGIENE SANITASI DAN KESEHATAN MASYARAKAT																														
D.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga				119,000			-		140,600			-		156,000			172,500			181,000			-	Dinkes						
1	Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	60%		60,000			75%		75,000			85%		85,000			95%		95,000			100%		99,000	Dinkes					
2	% kualitas air minum dilakukan pengawasan	50%		35,000			58%		40,600			65%		45,000			72%		51,000			80%		55,000	Dinkes					
3	% rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	100%		24,000			100%		25,000			100%		26,000			100%		26,500			100%		27,000	Dinkes					
4	Proporsi tempat tempat umum yang memenuhi syarat (%)	74%		7,200			75%		7,300			78%		7,500			79%		7,600			80%		7,800	Dinkes					
E. PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA																														
E.1 Kegiatan Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan																								DPPKBP3A						
1	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	68		200,000			10,000		69		225,000			15,000		69		250,000			20,000		70		275,000	25,000	70	300,000	50,000	DPPKBP3A
2	Persentase kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	58					59							59										70					DPPKBP3A	
3	Persentase kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	80,81					81,81							81,81										82,31				82,81	DPPKBP3A	
4	UPPKS (Aktif)	409					436							467										494				521	DPPKBP3A	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
F. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT																								
F.1 Kegiatan Replikasi ProGAS																								Di ndik
1	Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (PROGRAS)(piloting) (%)	1500 siswa	50,000	2,250,000	1700 siswa	50,000	2,550,000	2000 siswa	50,000	3,000,000	2200 siswa	50,000	3,300,000	2500 siswa	50,000	3,750,000							Di ndik	
G. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT																								
G.1 Kegiatan Pembinaan Agama																								Kemenag
1	Bimbingan Perkawinan calon pengantin	1,360	225,000	1,360	240,000	1,360	240,000	1,360	240,000	1,360	250,000	1,360	250,000	1,360	250,000	1,360	250,000	1,360	250,000	1,360	250,000	1,360	250,000	Kemenag
2	Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi remaja Usia Nikah (keg)	110	25,000	110	25,000	110	25,000	110	25,000	110	26,000	110	26,000	110	26,000	110	26,000	110	26,000	110	26,000	110	26,000	Kemenag
II PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM																								
A. PROGRAM PENINGKATAN POLA PANGAN HARAPAN																								
A.1 Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan			500,000					600,000				540,000				595,000						670,000		Dinpartan KP
1	Skor pola pangan harapan (%)	90.90		91.30				91.35				91.76				91.81								Dinpartan KP
2	Ketersediaan energi perkapita (%)	92.00		93.00				94.00				95.00				96.00								Dinpartan KP
3	Ketersediaan protein perkapita (%)	92.00		93.00				94.00				95.00				96.00								Dinpartan KP
4	Konsumsi energi perkapita perhari (Kkal)	2,401.00		2,406.00				2,411.00				2,416.00				2,421.00								Dinpartan KP
5	Konsumsi protein perkapita perhari (gram)	48.15		50.35				52.55				54.8				57.0								Dinpartan KP
A.2 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan		143.00	300,000	143.00	350,000	143.00	390,000	143.00	430,000	143.00	480,000	143.00	520,000	143.00	570,000	143.00	620,000	143.00	670,000	143.00	720,000	143.00	770,000	Dinpartan KP
1	luas pekarangan yang digunakan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan (m2)	3,000.00		4,000.00				4,200.00				4,400.00				4,600.00								Dinpartan KP
2	Jumlah keragaman komoditas pangan (jenis)																							Dinpartan KP
A.3 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		10.00	100,000	10.00	125,000	10.00	150,000	10.00	175,000	10.00	200,000	10.00	225,000	10.00	250,000	10.00	275,000	10.00	300,000	10.00	325,000	10.00	350,000	Dinpartan KP
1	Pengawasan dan pembinaan pangan (%)	71.00		72.00				73.00				74.00				75.00								Dinpartan KP
B. PROGRAM PENGUATAN CADANGAN PANGAN																								
B.1 Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan																								Dinpartan KP
1	Penanganan daerah rawan pangan (%)	63.00	250,000	64.00	300,000	65.00	350,000	66.00	400,000	67.00	450,000	68.00	500,000	69.00	550,000	70.00	600,000	71.00	650,000	72.00	700,000	73.00	750,000	Dinpartan KP
B.2 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan																								Dinpartan KP
1	Peningkatan jumlah desa mandiri pangan dan peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat	4.00	700,000	6.00	800,000	8.00	900,000	10.00	1,000,000	12.00	1,100,000	14.00	1,200,000	16.00	1,300,000	18.00	1,400,000	20.00	1,500,000	22.00	1,600,000	24.00	1,700,000	Dinpartan KP
2	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	96.00	150,000	97.00	150,000	98.00	170,000	99.00	200,000	100.00	225,000	101.00	250,000	102.00	275,000	103.00	300,000	104.00	325,000	105.00	350,000	106.00	375,000	Dinpartan KP
3	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)	96.00	150,000	97.00	150,000	98.00	170,000	99.00	200,000	100.00	225,000	101.00	250,000	102.00	275,000	103.00	300,000	104.00	325,000	105.00	350,000	106.00	375,000	Dinpartan KP
4	Jumlah Lumbung Pangan (unit)	23.00	200,000	27.00	250,000	31.00	300,000	35.00	350,000	39.00	400,000	43.00	450,000	47.00	500,000	51.00	550,000	55.00	600,000	59.00	650,000	63.00	700,000	Dinpartan KP
5	Jumlah Desa Mandiri Pangan (unit)	22.00	200,000	25.00	250,000	28.00	300,000	31.00	350,000	34.00	400,000	37.00	450,000	40.00	500,000	43.00	550,000	46.00	600,000	49.00	650,000	52.00	700,000	Dinpartan KP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
B.3 Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah																							Dinpertan KP
1	Penguatan Cadangan Pangan (%)		75.00	350,000			80.00	400,000			82.00	450,000			84.00	500,000			86.00	550,000			Dinpertan KP
2	Ketersediaan pangan utama		90.00	200,000			95.00	250,000			96.00	300,000			96.00	300,000			97.00	350,000			Dinpertan KP
C. PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERTANIAN																							
C.1 Kegiatan Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian																							Dinpertan KP
1	Prosentase kenaikan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pemasaran produksi pertanian (%)		10.00	300,000			10.00	350,000			10.00	400,000			10.00	450,000			10.00	500,000			Dinpertan KP
2	Jumlah pelaku usaha agribisnis (unit)		280.00				308.00				338.80				372.68				409.95				Dinpertan KP
3	Tersedianya akses promosi produk pertanian (kali)		5.00				5.00				5.00				5.00				5.00				Dinpertan KP
D. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN																							
D.1 Kegiatan Pengembangan Mekanisasi Pertanian																							
1	Prosentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi (%)		20.00	23,469			20.00	25,816			20.00	28,397			20.00	31,237			100.00	130,254			Dinpertan KP
2	Tersedianya Alat Mesin Pertanian (unit)		13,052	4,491,000			13,313	4,491,195			13,574	4,491,195			13,835	4,491,390			14,096	4,491,585			Dinpertan KP
D.2 Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian																							
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Ha)		800.00	1,200,000			850.00	1,275,000			900.00	1,350,000			950.00	1,425,000			1,000.00	1,500,000			Dinpertan KP
2	Pembangunan Jalan Produksi (meter)		5,000.00	4,500,000			30.00	4,500,000			5,000.00	4,500,000			5,000.00	4,500,000			5,000.00	4,500,000			Dinpertan KP
D.3 Kegiatan DAK Pertanian																							
1	Pembangunan embung (unit)		10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			Dinpertan KP
2	Pembangunan Sumber Air Tanah Dangkal/ Dalam (Unit)		10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			10.00	1,500,000			Dinpertan KP
E. PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN																							
E.1 Kegiatan Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)																							Dinpertan KP
1	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Padi		2.57				2.28				2.00				1.71				1.43				Dinpertan KP
2	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Jagung		0.33				0.22				0.11				0.07				0.02				Dinpertan KP
3	Persentase Luas Serangan OPT Tanaman Kedelai		8.10				7.09				6.07				5.06				4.05				Dinpertan KP
F. PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																							
F.1 Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan																							Dinpertan KP
1	Produksi padi (ton)		400,000				425,000				450,000				475,000				500,000				Dinpertan KP
2	Produksi jagung (ton)		13,267				13,400				13,534				13,667				13,806				Dinpertan KP
3	Produksi kedelai (ton)		1,593,41				1,609,34				1,625,43				1,641,69				1,658,11				Dinpertan KP
G. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN																							
G.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Peternakan																							Dinkannak
1	Jumlah produksi daging		21,706				22,357				23,078				23,719				24,431				Dinkannak
2	Jumlah produksi telur		17,208				17,724				18,256				18,804				19,368				Dinkannak
3	Jumlah produksi susu		3,748,000				3,860,000				3,976,000				4,095,000				4,218,000				Dinkannak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
H. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN																								
H.1 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna			85,000					100,000				120,000				130,000				150,000				Dinkannak
1	Prosentase Kelompok Ternak Terlatih Yang Menerapkan Teknologi	150 Org					200 Org				200 Org				250 Org				250 Org					
I. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK																								
I.1 Kegiatan Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner			175,000					175,000				200,000				220,000				245,000				Dinkannak
1	Jumlah produsen pangan asal hewan yang mempunyai ijin operasional (bersertifikat) NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Unit)	3.00				4.00					5.00				6.00				7.00					Dinkannak
2	Jumlah sampel Produk Hewan yang di uji di Balai Pelayanan Kesmavet (sampel)	400.00				425.00					450.00				475.00				500.00					Dinkannak
J. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN																								
J.1 Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya																								
1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (ton)	10,300				10,450					10,600				10,750				10,900					Dinkannak
K. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR																								
K.1 Kegiatan Pengembangan Perikanan Perairan Umum																								
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	885				898					912				926				939					Dinkannak
L. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL																								
L.1 Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin																								
1	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH (keluarga)	325 pdp; 27 Kec	644,000		168.315; 840.000	325 pdp; 27 kec	728,000			206.115; 840.000	325 pdp; 27 kec	812,000		243.915; 840.000	325 pdp; 27 kec	836,000		281.715; 840.000	325 pdp; 27 kec	900,000		319.515; 840.000		Dinsospermasdes
M. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI																								
M.1 Kegiatan Promosi Dagang dan Industri																								
1	Jumlah industri kecil dan menengah yang difasilitasi promosi produk (IKM)	42	350,000		0	43	300,000		0	44	310,000		0	45	285,000		0	46	260,000		0			Dinperindag
M.2 Kegiatan Monitoring Harga																								
1	Termonitoringnya distributor dan pengecer barang pokok dan barang penting lainnya (bulan)	12	200,000		0	12	200,000		0	12	200,000		0	12	200,000		0	12	200,000		0			Dinperindag
N. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan																								
N.1 Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional																								
1	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/ pasar rakyat (unit) pasar rakyat)	4	20,000,000		0	4	20,000,000		0	4	20,000,000		0	4	20,000,000		0	4	20,000,000		0	20,000,000		Dinperindag
N.2 Kegiatan Revitalisasi Pasar (DAK)																								
1	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/ pasar rakyat (unit pasar rakyat)	2	0	10,000,000	2	0	10,000,000	2	0	10,000,000	2	0	10,000,000	2	0	10,000,000	2	0	10,000,000	2	0	10,000,000		Dinperindag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
O. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA SERTA JARINGAN IRIGASI LAINNYA																							
O.1 Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi																							
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (ha)	71,6%	20,000,000		7,000,000	73,1%	20,000,000		5,000,000	74,6%	20,000,000		500,000	76,1%	20,000,000		5,000,000	77,6%	20,000,000			0	DPU
P. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU																							
P.1 Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku																							
1	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (jt m3)	70%	20,000,000			73%	20,000,000			79%	22,000,000			83%	25,000,000			87%	25,000,000				DPU
III MUTU DAN KEAMANAN PANGAN																							
A. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																							
A.1 Kegiatan Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya																							
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (Sampel)	20	10,000		0	25	15,000		0	30	20,000		0	35	25,000		0	50	30,000		0		Dinkes
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	95	150,000		0	95	175,000		0	95	200,000		0	96	225,000			96	225,000		0		Dinkes
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (%)	75	10,000		0	75	15,000		0	75	20,000		0	75	25,000			75	30,000		0		Dinkes
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (%)																						Dinkes
B. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH																							
1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknik IKM	90 IKM	1,000,000.00			110 IKM	1,100,000			110 IKM				-	130 IKM	1,150,000.00			130 IKM	1,150,000.00			Disperindag
C. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI																							
1	Meningkatnya Ketrampilan dan pengetahuan Teknologi Industri	20 IKM	60,000.00			20 IKM	60,000			20 IKM				20 IKM	60,000.00			20 IKM	60,000.00				Disperindag
D. PROGRAM PENINGKATAN POLA PANGAN HARAPAN																							
1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	10.00	100,000			10.00	125,000			2.00				2.00				2.00					Dinpertan KP
2	Pengawasan dan pembinaan pangan (%)	93,43				94,43				95,43				96,43				97,43					Dinpertan KP
E. PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERTANIAN																							
E.1 Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian																							
1	Jumlah pelaku usaha agribisnis (unit)	280.00				308.00				338.80				372.68				409.95					Dinpertan KP
2	Tersedianya akses promosi produk pertanian (kali)	5.00				5.00				5.00				5.00				5.00					Dinpertan KP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
F. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN																								
F.1 .Kegiatan Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan																								
1	Jumlah UPI yang mempunyai SKP (Unit)	2	150,000	750	750	3	150,000	1,000	1,000	4	150,000	1,250	1,250	5	150,000	1500	1500	6	150,000.00	17,500	17,500	Dinkanak		
F.2 Kegiatan Peningkatan Gemarikan																								
1	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	14,38	200,000				250,000					300,000				350,000				400,000			Dinkanak	
G. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN																								
G.1 Pengembangan Agribisnis Peternakan																								
1	Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih	16	120,000				120,000				16	150,000			16	150,000			16	160,000			Dinkanak	
G.2 Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Peternakan																								
1	Persentase Kelompok Usaha Peternakan berijin	10	150,000				150,000				10	150,000			10	150,000			10	170,000			Dinkanak	
IV PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT																								
A. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																								
A.1 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan																								
1	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber-PHBS) (%)	80%	45,000				81%	55,000				81.00%	60,000			81.50%	65,000			82%	70,000			Dinkes
2	Peningkatan mutu desa siaga - Proporsi desa/keurahan siaga aktif mandiri (%)	10%	183,250				15%	203,250				20%	223,250			25%	241,250			30%	241,250			Dinkes
A.2 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan																								
1	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik (kali)	6	20,000				6	20,000				8	23,000			8	27,000			10	36,000			Dinkes
2	Jumlah penyuluhan melalui media cetak (kali)	10,500	35,000				10,700	40,000				11,000	42,000			11,500	45,000			12,000	50,000			Dinkes
B. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR																								
B.1 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan																								
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Dokter Kecil (kab/kota)	27	15,000				27	20,000				27	25,000.00			27	25,000			27	25,000			Dinas Pendidikan
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Kader Kesehatan Remaja (kab/kota)	27	25,000				27	30,000				27	35,000.00			27	35,000			27	35,000			Dinas Pendidikan
C. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																								
C.1 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kepada Masyarakat																								
1	Jumlah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilahan dan pengelolaan sampah	100 Orang	2,000,000	0	0		2,000,000	0	0		2,000,000	0	0		2,000,000	0	0		2,000,000	0	0		DLH	
C.2 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata																								
1	Jumlah Sekolah yang berwawasan lingkungan sehat dan bersih (adiwiyata)	100 Sekolah	250,000	0	0		250,000	0	0		250,000.00	0	0		250,000	0	0		250,000	0	0		DLH	
1	Jumlah Sekolah yang berwawasan lingkungan sehat dan bersih (adiwiyata)	100 Sekolah				100 Sekolah					100 Sekolah				100 Sekolah				100 Sekolah				DLH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28				
I. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN																											
L.I Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah				200,000				200,000				200,000				200,000				200,000				Dinperkim			
1	Jumlah Kecamatan terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja / IPLT (Kecamatan)	4					4				7				7									Dinperkim			
2	Jumlah Kecamatan terlayani Instalasi Air Limbah (IPAL) (Kecamatan)	6		7,845,000			6		7,845,000			6		7,845,000			6		7,845,000			6		7,845,000	Dinperkim		
J. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH																											
J.I Kegiatan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih		72.00%		15,000,000		10,000,000	78.94%		15,000,000		10,000,000	80.44%		15,000,000		10,000,000	81.94%		15,000,000		10,000,000	83.44%		15,000,000	10,000,000	DPU	
1	Jumlah Sambungan Rumah Air Minum																								DPU		
V KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI																											
A. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN																											
A.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan																									Dinkes		
1	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)	39					39				39				39					39					Dinkes		
2	Rasio Jumlah Tenaga Gizi dan Puskesmas	100					100				100				100					100					Dinkes		
B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																											
B.1 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)				50,000	100,000			50,000	100,000			50,000	100,000			50,000	100,000			50,000	100,000			50,000	100,000	Bappedalitbang	
1	Jumlah Kecamatan yang telah mempunyai dan menerapkan Perda GAKY (Kab/Kota)	27					27				27				27					27					Bappedalitbang		
2	Jumlah Kecamatan yang telah membentuk Tim GAKY	27					27				27				27					27					Bappedalitbang		
B.2 Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD)																									Bappedalitbang		
1	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam upaya penganggulangan kemiskinan (Rakor TKPK)	12		200,000			12		250,000			12		250,000			12		250,000			12		250,000		Bappedalitbang	
VI PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA																											
A. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan																											
1	Presentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif	274		100,000	4,000	10,000	301		100,000	10,000	10,000	328		100,000	15,000	15,000	355		100,000	15,000	15,000	382		100,000	15,000	15,000	DPPKBP3A
VII PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH																											
A. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan																										DinmakerkopUKM	
1	Jumlah UKM yang membuat makanan olahan.	120	UKM	140,000			150	UKM	175,000			180	UKM	210,000			210	UKM	245,000			240	UKM	280,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
VIII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAAN INFORMASI STATISTIK BPS																							
	A. Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik																					Dinkominfo		
1	Jumlah publikasi/laporan statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN (buku)	400 buku	200,000				400 buku	200,000				400 buku	200,000						400 buku	200,000				
IX	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI																							
	A. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas																					Bappedalitbang		
1	Monitoring/Advokasi penyusunan RAD Stunting Kab/Kota	tuntin	100,000				14 OPD , 27 Kec	100,000				14 OPD , 27 Kec	100,000						14 OPD , 27 Kec	100,000				
X	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT																							
	A. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PKK																					Dinsospermasdes		
1	Persentase/Jumlah TPPKK yang dibina untuk melaksanakan kegiatan kebun gizi/toga di Kecamatan *(Lokasi)	331 Desa	900,000				331 Desa	950,000				331 Desa	950,000						331 Desa	950,000				
	B. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu																					Dinsospermasdes		
1	Persentase/jumlah capaian pembentukan posyandu integrasi di Kecamatan (unit)	6 Desa/kel	150,000				8 Desa/kel	175,000				10 Desa/kel	200,000						12 Desa/kel	225,000			14 Desa/kel	250,000
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN																							
	A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian																					Dinpertan KP		
1	Prosentase penyuluh pertanian terlatih (%)	100.00					100.00				100.00				100.00				100.00					
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Penyuluh Pertanian (orang)	187.00					187.00				187.00				187.00				187.00					
3	Jumlah Penyuluh pertanian yang terlatih (orang)	187.00					187.00				187.00				187.00				187.00					
	B. Kegiatan Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan																					Dinpertan KP		
1	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Model (unit)	4.00	2,000,000				4.00	2,000,000				4.00	2,000,000						4.00	2,000,000				

Rencana Aksi Daerah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memastikan bahwa seluruh pihak baik pemerintah dan non pemerintah dapat berkontribusi dalam penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Banyumas. Selain itu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 juga merupakan dokumen dinamis yang salah satu isinya memastikan adanya dukungan dalam penganggaran dan pembiayaan.

**BAB IX
PENUTUP**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda.	
2	Aspa - Kasra	
3	KDg Huku	
4	K. Dimks	